INDONESIA MENGGUGAT : STUDI HISTORIOGRAFI PANDANGAN SUKARNO TENTANG NASIONALISME

Frasta Ramadini[1], Hendra Naldi[2]

[1,2]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : [1]frastaramadini@gmail.com, [2]hendranaldi@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti Buku Indonesia Menggugat karya Ir. Sukarno dalam tinjauan historiografi yang berjudul Indonesia Menggugat: Studi Historiografi Pandangan Sukarno Tentang Nasionalisme untuk melihat pandangan nasionalisme Sukarno sebagaimana tercermin dalam teks tersebut. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini melihat bagaimana pandangan Sukarno tentang nasionalisme dalam buku Indonesia Menggugat. Dilihat juga dari kultuurgebudenheit, latar belakang dan kondisi jiwa zaman sukarno dalam menulis buku Indonesia Menggugat. Dalam penelitian historiografi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang tergolong dalam penelitian kualitatif. Langkah penelitian ini sebagai berikut: Pertama, mencari sumber penelitian yang terdiri dari buku Indonesia Menggugat. Kedua, analisis dan interpretasi berdasarkan kategori yang telah disusun oleh peneliti. Ketiga, menyajikan data yang telah diteliti dalam sebuah karya berupa skripsi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan Sukarno dalam Indonesia Menggugat adalah sebuah warisan intelektual dan ideologis yang tidak hanya penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sangat relevan sebagai acuan moral dan politik dalam menghadapi tantangan zaman. Nasionalisme Marhaenisme yang digagas Sukarno memberikan arah bagi perjuangan masa kini dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan ekonomi, serta persatuan nasional dalam bingkai kebhinekaan Indonesia.

Kata Kunci : *Indonesia Menggugat, Sukarno, Nasionalisme, Historiografi*

ABSTARCT

This study examines Ir. Sukarno's book Indonesia Menggugat (Indonesia Accuses) in a historiographical review entitled Indonesia Menggugat: A Study of Historiography of Sukarno's View of Nationalism to examine Sukarno's view of nationalism as reflected in the text. The issue raised in this study is how Sukarno views nationalism in the book Indonesia Menggugat. It also looks at the cultuurgebudenheit, background, and spirit of the times in which Sukarno wrote the book Indonesia Menggugat. In this historiography research, the author uses a literature research method that is classified as qualitative research. The steps of this research are as follows: First, searching for research sources consisting of the book Indonesia Menggugat. Second, analysis and interpretation based on categories compiled by the researcher. Third, presenting the researched data in a thesis. The results of this research conclude that Sukarno's views in Indonesia Menggugat are an intellectual and ideological legacy that is not only important in the history of the struggle for Indonesian independence, but also highly relevant as a moral and political reference in facing the challenges of the times. The Marhaenism nationalism initiated by by Sukarno provides direction for the current struggle to achieve social justice, economic sovereignty, and national unity within the framework of Indonesian diversity.

Keywords : *Indonesia Menggugat (Indonesia Accuses), Sukarno, Nationalism, Historiography.*

PENDAHULUAN

Nasionalisme adalah sebuah paham yang menekankan pentingnya kedaulatan negara dan perasaan memiliki identitas kolektif yang kuat dalam suatu kelompok masyarakat. Paham nasionalisme lahir dari sebuah keyakinan sekelompok individu yang berbagi sejarah, budaya, Bahasa dan nilai yang sama memiliki hak dan tanggung jawab untuk mengatur, membentuk dan melindungi negara mereka. Di Indonesia, nasionalisme berkembang sebagai reaksi terhadap kolonialisme, dengan tujuan memperkuat *nation building* dan *character building* di dalam negeri, serta menolak segala bentuk penindasan dari luar. (Rambe et al. 2019) Nasionalisme merupakan kesadaran dan kebanggaan bernegara yang menimbulkan sikap dan perasaan yang lebih mementingkan kehidupan nasional diatas kepentingan pribadi, golongan, daerah ataupun partai yang diwakili. Nasionalisme Indonesia menurut Sukarno, bukanlah jingo-nasionalisme atau chauvanisme, dan bukan pula suatu tiruan atau kopi dari nasionalisme barat. Nasionalisme adalah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai wahyu. (Kusumawardani and Psikologi 2004)

Sukarno merupakan salah satu pemimpin bangsa Indonesia sekaligus pelopor sebuah negara Indonesia merdeka. Nasionalisme yang ditanamkan Sukarno untuk meneguhkan karakter kebangsaan yang kuat dan menggelora. Pemikiran yang disampaikan Sukarno mulai dari sebelum kemerdekaan masih sangat relevan dengan masa kini yang akan datang. Relevansi pemikiran nasionalisme Sukarno bagi generasi muda Indonesia konsepnya mengenai persatuan, kemandirian dan gotong royong untuk menjadi panduan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman bangsa Indonesia dalam menghadapi tentangan global. Kepemimpinan dan anti-kolonialisme Sukarno dapat menginspirasi generasi muda dalam membangun Indonesia. Sikap tersebut menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia menghadapi masa depan yang semakin kompleks. (Ratnaningtias 2023)

Nasionalisme yang ditujukan untuk perlawanan terhadap penjajah itu menjadi upaya dalam menemukan jati diri dan kepribadian nasional. Menurut Sukarno nasionalis Indonesia tidak boleh hanya sekedar mengutuskan demokrasi saja, tetapi nasionalisme Indonesia harus nasionalisme yang berperikemanusiaan, yang sosio-nasionalisme yang mempunyai arti nasionalisme Marhaen yang menolak borjuisme. Yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah persatuan dari berbagai golongan agar jauh dari sifat kolonialisme, imperialisme maupun kapitalisme yang tidak menyikai nasionalisme. Sukarno malah menggunakan senjata nasionalisme dalam melawan kolonialisme, imperialism dan kapitalisme tersebut. (Suseno, 2015)

Pandangan nasionalisme Sukarno ini terekam secara kuat dalam Indonesia Menggugat, sebuah pledoi yang ia bacakan pada persidangan tahun 1930 di Pengadilan Landraad Bandung. Karya tersebut memuat kritik tajam terhadap imperialisme dan kapitalisme, serta juga menawarkan konsep Marhaenisme sebagai dasar perjuangan rakyat Indonesia. Pemikiran Sukarno dalam buku ini tetap relevan terutama untuk menjawab tantangan nasionalisme di era globalisasi dan menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman. (Gonggong, 2016) Urgensi penelitian ini terlaetak pada minimnya kajian historiografi secara khusus yang menempatkan Indonesia Menggugat sebagai objek utama untuk menelusuri pandangan Sukarno tentang nasionalisme. Buku ini tidak hanya bernilai historis, tetapi juga memuat landasan ideologis yang menjadi fondasi berdirinya negara Indonesia. Ditengah tantangan global saat ini, mengkaji ulang pemikiran nasionalisme Sukarno menjadi penting untuk memperkuat kesadaran kebangsaan generasi muda dan menjaga kedaulatan bangsa.

Dengan demikian, fokus penelitian ini diarahkan pada studi historiografi untuk menelusuri, menganalisis, dan memaknai pandangan Sukarno tentang nasionalisme sebagaimana tertuang dalam Indonesia Menggugat. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan ideologis perjuangan kemerdekaan, relevansinya terhadap nasionalisme Indonesia masa kini, serta kontribusi ilmiah dalam pengembangan historiografi Indonesia. Dengan mengkaji historiografi buku Indonesia Menggugat akan menemukan sebuah formulasi pandangan Sukarno mengenai nasionalisme. Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, terkhusus kajian ilmu sejarah indonesia tentang pandangan Sukarno dan memperkaya literatur sejarah melalui historiografi untuk menemukan pandangan nasionalisme Sukarno. Dan juga bermanfaat bagi pembaca umum dan dapat digunakan sebagai referensi dalam karya sastra.

METODE

Dalam penelitian historiografi metode yang dipakai adalah studi pustaka *(Library Research)* dan tergolong dalam penelitian kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah analisis isi dalam sebuah karya tanpa adanya riset lapangan. Dalam studi pustaka penelitian di fokuskan dan dibatasi hanya dalam pustaka, sesuai dengan namanya. Antara penelitian yang menggunakan studi pustaka dan studi lapangan terdapat batasan yang sangat jelas. Hal ini bukan tanpa alasan, beberapa bidang keilmuan seperti Sejarah, ilmu agama, kedokteran dan ilmu lainnya dalam penelitiannya hanya dapat menjawab persoalan dari penelitian melalui penelitian pustaka dan sulit untuk mendapatkan jawaban dari riset lapangan.

Antara penelitian yang menggunakan studi pustaka dan studi lapangan terdapat batasan yang sangat jelas. Dalam studi kepustakaan penelitian di fokuskan dan dibatasi hanya dalam pustaka, sesuai dengan namanya. Studi pustaka berfokus pada koleksi bacaan tanpa adanya riset lapangan. Hal ini bukan tanpa alasan, beberapa bidang keilmuan seperti sejarah, ilmu agama, kedokteran dan ilmu lainnya dalam penelitiannya hanya dapat menjawab persoalan dari penelitian melalui penelitian pustaka dan sulit untuk mendapatkan jawaban dari riset lapangan. (Zeid, 2004). Dalam studi kepustakaan terdapat 4 langkah penelitian yang akan penulis lakukan diantaranya: (1) Menyiapkan perlengkapan penelitian: penulis menyiapkan perlengkapan seperti alat tulis pensil atau pulpen, kertas atau buku catatan dan lainnya. Benda tersebut digunakan untuk mencatat data yang penulis temukan diperpustakaan. (2) Membuat bibliografi kerja: penulis mengumpulkan beberapa karya terkait Indonesia Menggugat dan karya lainnya. Karya-karya terkait tersebut bisa penulis dapatkan secara langsung diperpustakaan ataupun secara online melalui *website.* Setelah terkumpul penulis mengelompokkan berdasarkan kepentingan data penelitian. (3) Mengatur waktu: Dalam pengaturan waktu penulis mengerjakan penelitian ini tidak dapat ditentukan dengan pasti. (4) Membuat dan membaca catatan penelitian: penulis menganalisis buku Indonesia Menggugat serta karya-karya yang terkait. Menganalisis dan menafsirkan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh latar belakang penulis (Sukarno) terhadap karyanya. Setelah menganalisis dan menafsirkan, penulis akan menarik kesimpulan.

Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang holistik dan komprehensif mengenai pandangan Sukarno mengenai Nasionalisme dalam buku Indonesia Menggugat. Dalam penelitian studi pustaka terdiri dari beberapa tahapan yakni: Pertama, mencari dan menemukan sumber penelitian yang terdiri dari buku *Indonesia Menggugat.* Peneliti mendapatkan buku Indonesia Menggugat melalui *e-commerce*. Peneliti juga mengumpulkan

karya-karya yang relevan dengan pembahasan peneliti. Karya tersebut berupa buku, skripsi, tesis, disertasi dan majalah, penulis dapatkan di Perpustakaan UNP, Perpustakaan FIS UNP, Labor Departemen Pendidikan Sejarah ataupun secara online berupa *soft file*. Setelah karya-karya tersebut terkumpul, selanjutnya penulis akan mengelompokkannya berdasarkan kepentingan data.

Dalam pengumpulan sumber penelitian, terdapat tiga tahapan yang paling berkaitan. Pertama, peneliti menyiapkan alat dan perlengkapan penelitian terdiri dari resensi atau ringkasan dari buku yang telah dibaca, alat tulis, laptop dan media pendukung lainnya. Kedua, peneliti Menyusun langkah-langkah kerja berhubungan dengan waktu membaca terhadap sumber utama dari penelitian dan membuat kategori klasifikasi bacaan. Ketiga, membaca dan membuat catatan terhadap bacaan, lalu peneliti melakukan analisis interpretasi dari karya-karya yang telah diteliti serta diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori yang telah disusun oleh peneliti. Pada tahapan terakhir peneliti menyajikan data-data yang telah diteliti dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kultuurgebudenheit Mempengaruhi Pandangan Nasionalisme Sukarno

Pandangan Sukarno mengenai Nasionalisme tidak bisa dilepaskan dari latar belakang keluarganya yang multicultural. Konsep *kultuurgebdenheit* inilah yang menjadi kerikatan individu pada kebudayaan yang membentuk kesadaran sosial dan politiknya, jelas tercermin dalam kehidupan awal Sukarno. Ia lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya dari ayah Jawa Muslim, Raden Sukemi Sosrodihardjo, seorang guru bersemangat modernisasi, dan ibu keturunan bangsawan Bali, Ida Ayu Nyoman Rai dari keluarga Brahmana Buleleng. (Anhar Gonggong, 2011) Pertemuan dua budaya besar ini membekali Sukarno dengan kesadaran bahwa identitas bangsa Indonesia tersusun dari beragam suku, bahasa, agama, dan tradisi. Dari ayahnya Raden Sukemi, Sukarno mengenal nilai-nilai keislaman serta rasionalitas pendidikan modern yang menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai jalan menuju kemajuan bangsa. Tradisi jawa yang diwariskan ayahnya mengajarkan konsep "hamemayu hayuning bawono" (memelihara keselamatan dunia) yang kemudian diadaptasi Sukarno sebagai dasar filosof Nasionalisme indonesia yang tidak hanya mementingkan kepentingan bangsa sendiri tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dunia. (Rosihan Anwar, 1986)

Dalam keluarga, Sukarno menyerap nilai gotong royong dan konsep kepemimpinan jawa yang menekankan "ing ngarsi sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani", yang memperngaruhi cara pandangnya tentang peran pemimpin dalam membangun kesadaran nasional. (Ki Hajar Dewantara, 1977) Warisan budaya Jawa juga memberikan Sukarno pemahaman tentang konsep rakyat dan raja yang kemudian ia tranformasikan menjadi konsep hubungan antara pemimpin dan rakyat dalam kerangka Nasionalisme modern. Dalam Indonesia Menggugat, Sukarno menyatakan bahwa "perjuangan kemerdekaan harus melibatkan semua lapisan masyarakat dalam satu ikatan budaya yang kuat, dari petani hingga cendikiawan". (Sukarno, 1983) Dari ibunya, Sukarno menyerap nilai spiritualitas Hindu dan konsep "Tri Hita Karana", menekankan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Dalam buku Indonesia Menggugat pengaruh ini terlihat ketika Sukarno mengatakan bahwa "kemerdekaan Indonesia harus dibangun diatas fondasi keseimbangan antara kemajuan material dengan kekayaan spiritual bangsa". (Sukarno, 1983) Sistem kasta dalam budaya Bali yang dialami Sukarno melalui garis keturunan ibunya memberikan pemahaman yang mendalam tentang

stratifikasi sosial, bahwa Nasionalisme Indonesia harus melampaui batas kasta dan kelas sosial untuk menciptakan identitas baru berbasis kebangsaan.(Cindy Adams, 2015)

Pengaruh keturunan campuran Jawa-Bali juga terlihat dalam cara Sukarno memahami hubungan antara tradisi dan modernitas. Kedua budaya ini memiliki tradisi yang kuat dalam menyerap dan mengatasi pengaruh luar tanpa kehilangan identitas dasarnya.(Adrian Vickers, 1989) Tradisi Jawa dan Bali menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan adalah kekayaan dan dasar solidaritas. Kesadaran ini yang kelak berpengaruh pada konsep Nasionalisme yang inklusif sebagaimana yang tergambar dalam buku Indonesia Menggugat. Sukarno menekankan pentingnya persatuan seluruh rakyat Indonesia melampaui sekat-sekat kesukuan maupun agama. (Yudi Latif, 2005) Aspek religius dari kedua orang tuanya juga memberikan kontribusi yang signifikan, tradisi Jawa yang memadukan elemen Islam dalam kepercayaan Jawa Kuno, dan tradisi Bali yang mempertahankan Hindu Dharma yang mengajarkan Sukarno bahwa spiritualitas merupakan elemen penting dalam ikatan budaya bangsa.

Sebagai anak dari perkawinan campuran Jawa-Bali juga memberikan Sukarno pemahaman yang mendalam tentang pentingnya toleransi dalam membangun ikatan budaya yang kuat. Dalam kehidupan keluarganya, Sukarno menyaksikan bagaimana dua tradisi budaya yang berbeda dapat hidup berdampingan secara harmonis. (Cindy Adams, 2015) Dari latar belakang keturunan ini juga mempengaruhi cara Sukarno memahami estetika dan seni sebagai bagian dari ikatan kebudayaan. Kedua tradisi budaya ini memiliki kekayaan seni yang luar biasa, Jawa dengan wayang, gamelan dan batiknya, sementara Bali dengan seni ukir, tari dan lukisannya. Sukarno memahami bahwa seni bukan hanya hiburan, tetapi merupakan untuk mengekspresikan dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa.

Pada latar belakang keturunan Jawa-Bali memiliki kaitan yang sangat logis dengan pengembangan ideologi Marhenisme yang menjadi ciri khas pemikiran politik Sukarno. Tradisi Jawa yang diwariskan oleh ayahnya memberikan Sukarno pemahaman tentang konep wong cilik (rakyat kecil) sebagai elemen dalam struktur sosial yang harus diberdayakan. Tepa slira (menempatkan diri pada posisi orang lain) sebuah filosofi jawa yang mengajarkan Sukarno untuk memahami penderitaan rakyat kecil meskipun ia sendiri berasal dari keluarga yang relative berkecukupan.(Niels Mulder, 1978) Tradisi gotong royong yang menekankan kebersamaan dan saling membantu tanpa memandang status sosial menjadi inspirasi bagi konsep Marhaenisme yang mengutamakan kebersamaan diantara rakyat kecil. Pengaruh garis keturunan Bali dari ibunya memberikan dimensi yang unik mengenai pembentukan konsep Marhenisme, khususnya terkait dengan pemahaman tentang status sosial namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pengalaman ini mengajarkan Sukarno meskipun struktur sosial memiliki stratifikasi, nilai kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas utama. (I Gede Pitana, 1978)

Konsep Marhaenisme sebagagi ideologi yang berpihak pada rakyat kecil. Dari kedua tradisi Jawa-Bali ini memiliki konsep yang kuat tentang tanggung jawab sosial dan ekonomi untuk melindungi yang lemah dan tidak berdaya. Konsep Marhaen sebagai representasi rakyat kecil yang mandiri dan bekerja keras merupakan idealisasi dari nilai-nilai yang terdapat dalam kedua tradisi budaya yang membentuk kepribadian Sukarno. (Sukarno, 1965) Sebagai seorang anak dari keluarga yang relatif Sukarno memiliki kesadaran kuat tentang penderitaan rakyat kecil menciptakan pembentukan ideologi Marhaenisme. *Kultuurgebudenheit* dari garis keturunan Jawa-bali yang dimiliki oleh Sukarno dan konsep Marhaenisme menunjukkan bahwa ideologi politik Sukarno bukan merupakan adopsi murni dari teori-teori barat, tetapi merupakan hasil dari nilai-nilai budaya Indonesia yang kemudian diaplikasikan dalam konteks perjuangan. Dalam konteks

ini, Marhaenisme bukan hanya strategi politik tetapi juga manifestasi dari nilai-nilai budaya Indonesia yang menekankan kebersamaan, keadilan sosial, dan tanggung jawab.

Cara berfikir seseorang tidak pernah lahir dalam ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, budaya, dan pergaulannya. Pertemanan dan persahabatan Sukarno memiliki peran penting dalam membentuk gagasan Nasionalisme yang kemudian ia tuangkan secara tegas dalam pledoi Indonesia Menggugat. Bagi Sukarno, persahabatan bersifat ideologis karena memberikan ruang bagi Sukarno untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta memperluas pandangannya tentang perjuangan bangsa Indonesia. Semasa mudanya di Surabaya, Sukarno tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto dan belajar tentang arti kepemimpinan serta strategi pergerakan. Lingkungan tersebut mempertemukan Sukarno dengan tokoh mudah lain seperti Musso, Alimin, dan Semaun yang memperkenalkannya pada gagasan Marxisme dan perjuangan kelas. Dari inilah Sukarno mulai memahami bahwa perjuangan nasional tidak bisa dilepaskan dari persoalan keadilan dan nasib kaum kecil. Ketika melanjutkan pendidikan di Bandung, Sukarno memperluas pertemanannya yang turut membentuk arah pemikirannya. Sukarno bersahabat erat dengan Sartono, Maskun, dan Gatot Mangkupraja, yang kemudian mereka bersama-sama mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI). Persahabatan ini memperkaya pendangannya mengenai organisasi modern dan perjuangan kolektif bangsa. (Rosihan Anwar, 1986)

Hubungan Sukarno dengan Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara turut membentuk konsep Marhaenisme. Dr. Cipto memberikan pengaruh yang sangat mendalam dalam membentuk konsep Marhaenisme Sukarno melalui teladan hidup yang konsisten antara pemikiran dan praktik. Sebagai dokter terpelajar yang memilih hidup sederhana dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk perjuangan kemerdekaan, Cipto menunjukkan kepada Sukarno bahwa menjadi marhaen bukanlah tentang status ekonomi tetapi tentang pilihan hidup untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. (Mohammad Dimyati, 1951) Dari Ki Hajar Dewantara, Sukarno menyerap menyerap pemikiran bahwa pendidikan dan kebudayaan merupakan fondasi utama membangkitkan kesadaran kebangsaan. Ki Hajar Dewantara memberikan kontribusi dalam membentuk aspek pendidikan dan kultural dari identitas marhaen Sukarno melalui pendidikan yang berakar pada kearifan rakyat. (Ki Hajar Dewantara, 1977) . Dalam lingkaran pergaulan yang lebih luas, Sukarno juga bersahabat dengan kalangan pergerakan Islam maupun sosialis. Hubungan baik Sukarno dengan tokoh Sarekat Islam dan kelompok pemuda memperkaya gagasan tentang inklusivitas Nasionalisme. (Yudi Latif, 2005)

Sukarno juga bersahabat dengan Douwes Dekker, Pengalaman melihat bagaimana Douwes Dekker rela menjadi mengganti kewarganegaraannya dan hidup dalam kemiskinan demi konsisten dengan perjuangannya memberikan Sukarno pemahaman yang mendalam tentang makna pengorbanan dalam konteks Marhaenisme. (Savitri Scherer, 1999) Dari Douwes Dekker inilah Sukarno belajar bahwa Nasionalisme Indonesia harus bersifat inklusif dan tidak boleh terjebak dalam chauvanisme ras atau agama yang dapat merusak persatuan bangsa. Dari Dr. Soetomo, ia menunjukkan kepada Sukarno model pemimpinan yang efektif dalam konteks perjuangan politik. (Akira Nagazumi, 1989) Teknik komunikasi yang menjadi ciri khas kepemimpinan Sukarno merupakan hasil dari pembelajaran dengan Soetomo tentang bagaimana menjadi jembatan yang efektif antara dunia intelektual dan dunia rakyat kecil. (Cindy Adams, 2015)

Lingkaran persahabatan dengan kaum muda seperti Mohammad Hatta, Sutan Syahrir, dan Amir Syarifuddin memberikan Sukarno pandangan tentang berbagai model kepemimpinan yang dapat diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun mereka semua berasal dari kalangan terpelajar, namun mereka memilih dengan perjuangan rakyat kecil dan hidup dalam

kesederhanaan. (George Mc Turnan Kahin, 1995) Perdebatan intelektual dengan lingkaran generasi muda ini memperkaya pemahaman Sukarno tentang berbagai kepemimpinan marhaen yang dapat disesuaikan dengan konteks dan tantangan yang berbeda. Hatta dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana, rasional, dan bersahaja, Syahrir dengan intelektualisme yang tetap populis dan dekat dengan rakyat, serta Amir dengan radikalisme yang berakar pada solidaritas kelas memberikan Sukarno berbagai contoh konkret tentang bagaimana menjadi marhaen yang autentik dalam konteks perjuangan. (Sutan Syahrir, 1948)

Pengaruh lingkaran persahabatan dalam membentuk identitas marhaen menunjukkan bahwa Sukarno tidak mengambil masalah antara status sosialnya sebagai intelektual dengan identifikasi politiknya sebagai marhaen. Interaksi dengan sahabat dari berbagai kalangan elite terpelajar justru memperkuat keyakinannya bahwa seorang yang benar-benar memahami ikatan kebudayaan Indonesia akan secara natural dan logis memilih untuk menjadi marhaen. (Sukarno, 1965) Dari berbagai tokoh nasionalis dari kalangan intelektual dan aktivis politik tidak menjauhkan Sukarno dari identitas marhaen, tetapi justru memperkuat, memperdalam, dan mematangkan pemahamannya tentang apa yang sesungguhnya dimaksud dengan menjadi marhaen dalam perjuangan kemerdekaan nasional.

Pemikiran seorang tokoh lahir dari keterikatan dengan lingkungan sosial, budaya, dan politiknya. Dalam diri Sukarno pengalaman keterlibatan dalam berbagai organisasi pergerakan sangat mempengaruhi pembentukan pandangan Nasionalismenya. Dari organisasi inilah Sukarno menyerap nilai-nilai, membangun kesadaran politik dan mengolah ide-ide yang kemudian diwujudkan salah satunya dalam pledoi Indonesia Menggugat. Interaksi organisasi ini juga melahirkan kerangka pemikiran Marhaenisme yang menjadi ciri khas ideologi Nasionalisme Sukarno. Salah satu organisasi awal yang mempengaruhi pemikiran Sukarno adalah Sarekat Islam (SI). Melalui HOS. Tjokroaminoto, Sukarno diperkenalkan pada dunia politik kebangsaan dan belajar bahwa politik tidak cukup digerakkan oleh kaum elit, melainkan harus menyentuh lapisan masyarakat kecil. Hal ini memperkuat keyakinan Sukarno bahwa nasionalisme Indonesia harus bersifat inklusif, melibatkan semua golongan tanpa memandang latar belakang agama ataupun status sosial. (Anhar Gonggong, 2016) Saat melanjutkan pendidikan di Bandung, Sukarno juga bergabung dengan organisasi Algemenee Stucie Club yang digagas oleh Dr. Soetomo. Dari organisasi ini Sukarno terlatih berdiskusi tentang sosialisme, demokrasi, dan strategi kebangsaan bersama dengan kaum intelektual muda. Pola pikir ini tampak dalam Indonesia Menggugat ketika ia menguraikan imperialisme sebagai sistem global yang menindas bangsa terjajah. (Rosihan Anwar, 1986)

Selain itu, melaui Indische Partij dan Partai Sarekat Islam indonesia (PSII), Sukarno menyerap semangat radikal dari Tiga Serangkau serta memahami sinergi antara Islam dan Nasionalisme. Kedua pengalaman organisasi ini mempertegas keyakinannya bahwa Nasionalisme Indonesia bersifat inklusif. Puncak pembentukan kesadran politik Sukarno terjadi ketika ia mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1927 bersama Sartono, Maskun, dan Gatot Mangkupradja. Melalui PNI, Sukarno mengembangkan gagasan persatuan politik yang berlandaskan pada keberagaman bangsa. PNI menjadi kendaraan politik utama bagi gagasan Nasionalisme Sukarno dengan tujuang yang jelas: mencapai Indonesia merdeka melalui kekuatan sendiri, tanpa kompromi dengan penjajah. (Yudi Latif, 2015)

Latar belakang keturunan Jawa–Bali, pertemanan dan persahabatan dengan tokoh-tokoh pergerakan, serta pengalaman dalam organisasi mengantarkan Sukarno pada pencarian ideologi yang sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia. Ia menolak menyalin Marxisme ala Barat karena

realitas Indonesia berbeda dengan realitas industri Eropa. Dari interaksinya dengan kaum kecil, khususnya perjumpaan dengan petani bernama Marhaen di Bandung, Sukarno melihat bahwa rakyat Indonesia bukanlah proletar tanpa alat produksi, melainkan pemilik alat produksi sederhana yang tetap terjajah oleh struktur kolonial. Dari sinilah lahir gagasan Marhaenisme, ideologi yang berakar pada kondisi rakyat Indonesia dan menjawab kebutuhan nasionalisme yang inklusif, berbasis massa, dan revolusioner. Marhaenisme menjadi logis bagi Sukarno karena merupakan hasil sintesis antara pengaruh budaya keluarga, pengalaman sosial, dan dinamika organisasi yang membentuk kesadaran politiknya.

***Zeitgeist* Terjadinya Pembentukan Nasionalisme Indonesia**

Awal abad ke-20 merupakan masa penting bagi perjuangan bangsa Indonesia, ditandai dengan munculnya kesadaran kebangsaan sebagai reaksi terhadap ketimpangan sosial, eksploitasi ekonomi, dan dominasi politik yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada akhir abad ke-19 di kalangan Kristen dan Partai Sosial Demokrat di negara Belanda semakin memuncak kecaman atas aspek-aspek yang menindas dari politik kolonial. Van Deventer berpendapat bahwa Belanda telah mengisap kekayaan dari Hindia dan sebagai akibatnya mempunyai "utang budi" kepada mereka, yang harus dibayarkan kembali dalam bentuk suatu kebijaksaan kesejahteraan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib warga Indonesia. Politik Etis yang dicanangkan pada tahun 1901 sebagai bentuk "balas budi" Belanda kepada rakyat Indonesia membawa tiga program utama, yaitu irigasi, edukasi, dan transmigrasi. (John D. Legge, 1972) Munculnya kebijakan ini mengakibatkan perubahan yang mendasar sedemikian rupa di lingkungan penjajahan. Eksploitasi terhadap Indonesia mulai berkurang sebagai pembenaran utama bagi kekuasaan Belanda dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. (Ricklefs M.C, 1994) Meskipun hasil yang dicapai tidak begitu besar, kebijakan tersebut membuka ruang baru bagi munculnya perubahan sosial, terutama dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Dari sinilah tumbuh generasi baru kaum bumiputra yang terdidik dan memiliki kesadaran nasional.

Rasa tidak puas masa itu membutuhkan kepemimpinan dan dalam hal ini, hasil Politik Etis itu bahkan mempunyai makna yang lebih besar lagi. Dua hal yang tampak menonjol: kalangan atas yang menerima pendidikan barat hanya menjadi suatu kelompok kecil dalam masyarakat, meskipun itu suatu kenyataan, tetapi mereka adalah kalangan atas yang digaji rendah, frustasi, dirundung kebencian karena ketiadaan kesempatan, dan lekas tersinggung oleh pandangan yang meremehkan dan menghina, yang disebabkan statusnya yang rendah dan sikap Belanda yang secara sembarangan memamerkan keunggulannya. Dari unsur inilah muncul "kalangan elite politik" Indonesia, yang mampu mengadakan diagnosis tentang kondisinya yang tidak menyenangkan itu dan siap mengerahkan rasa tidak puas massa pedesaan dan massa di perkotaan. Dari sinilah muncul generasi kaum terpelajar bumiputra yang mulai memiliki pemikiran kritis terhadap ketimpangan sosial dan dominasi kolonial. (John. D. Legge, 1997) dari suasana intelektual baru itu, bermunculan berbagai organisasi modern yang berperan penting dalam kebangkitan nasional seperti Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908, organisasi ini yang menumbuhkan semangat persatuan dalam kalangan priyayi jawa dan juga menandai kebangkitan kesadaran kolektif sebagai bangsa. (Kahin George Mc Turnan, 1952) Sekitar tahun 1911 muncul organisasi Sarekat Islam dan menjangkau lapisan rakyat yang lebih luas, menyuarakan kepentingan rakyat kecil terutama dikalangan pedagang dan petani. Sarekat Islam menjadi penghubung antara kesadaran sosial dan semangat nasional. SI menjadi cikal bakal pergerakan politik massa dan memeperkuat rasa solidaritas antar kelompok etnis dan kelas sosial. (Takashi

Shiraishi, 1997) serta Indische Partij (1992) muncul dan menyuarakan tuntutan kemerdekaan penuh dari para tokohnya yaitu Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka memperkenalkan ide nasionalisme lintas ras dan menentang diskriminasi kolonial secara terbuka. (John D. Legge, 1997)

Dalam konteks inilah muncul sosok Sukarno, yang lahir di Surabaya pada tahun 1901 dari keluarga guru dan bangsawan dengan latar belakang Jawa–Bali. Latar belakang keluarga ini memberikan dasar pendidikan moral, keagamaan, dan kebangsaan yang kuat. (Peter Kasenda, 2010) Sukarno mengenyam pendidikan di ELS Mojokerto, lalu melanjutkan ke HBS Surabaya, tempat di mana ia tinggal di rumah H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam yang dikenal sebagai "guru para pemimpin bangsa." Dari lingkungan inilah Sukarno mengenal dunia politik kebangsaan dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Musso, Alimin, dan Semaun yang memperkenalkannya pada gagasan sosialisme dan marxisme. (Sukarno, 1965) Setelah menyelesaikan pendidikannya di *Technische Hoogeschool* (THS) Bandung pada tahun 1926, Sukarno semakin aktif dalam dunia pergerakan. Ia bergabung dengan *Algemeene Studie Club*, sebuah kelompok diskusi yang digagas oleh Dr. Soetomo, tempat ia dan rekan-rekannya membahas persoalan sosial, demokrasi, dan strategi kebangsaan. Dari sini pula mulai terbentuk pemikiran kritis Sukarno tentang kolonialisme sebagai sistem global yang menindas bangsa-bangsa terjajah. (Peter Kasenda, 2010)

Bersama teman-teman dari *Algemenee Stduieclub* yaitu Mr. Iskaq, Mr. Soenarjo, Dr.Tjipcto dan Soedjadi, Sukarno pada tanggal 4 Juli 1927 mendirikan partai yang dinamakan Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) di pavilion rumah Mr.Iskaq. Perserikatan Nasional Indonesia berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada tahun 1928 saat kongres pertama di Surabaya. Tujuan dari partai ini yaitu kemerdekaan sepenuhnya, terdapat pada pasal 2 anggaran dasar partai merumuskan tujuan perkumpulan ini yaitu mengusahakan kemerdekaan Indonesia. (Nanang Yudhi, 2024) Melalui PNI Sukarno yakin bahwa massa dan gerakan massa adalah kunci utama kemerdekaan Indonesia. Kebanyakan anggota PNI berasal dari golongan kelas borjuis kecil di kota-kota dan masyarakat petani di desa. Sukarno mengembangkan gagasan tentang persatuan politik yang berlandaskan keberagaman bangsa dan semangat nasionalisme yang inklusif. PNI berkembang pesat dengan berbagai kegiatan kongres, propaganda, dan pendidikan politik bagi rakyat. (Sartono Kartodirdjo, 1992)



Gambar 1. Sukarno Dan Para Petinggi PNI
Sumber: Daftar Arsip Alih Media Foto Sukarno 1950-1964,
Arsip Nasional Republik Indonesia (SKR 736)

Keberhasilan PNI ini membuat pemerintah kolonial Belanda khawatir terhadap pengaruhnya. Pada bulan Desember 1929, Sukarno bersama beberapa tokoh PNI ditangkap polisi di Yogyakarta dibawa dan ditahan di penjara Banceuy, Bandung. Mereka kemudian diadili di Landraad Bandung pada tahun 1930 dengan tuduhan menghasut dan menyebarkan kebencian terhadap pemerintah Belanda. Selama dalam tahanan, Sukarno menulis pembelaan diri yang kemudian dikenal sebagai "Indonesia Menggugat." Pledoi ini dibacakan di persidangan pada 18 Agustus 1930, dan menjadi salah satu teks politik paling penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. (Sartono Kartodirdjo, 1975)



Gambar 2. Para Terdakwa Pimpinan PNI Yang Ditahan Dan Diadili

Sumber: Museum Gedung Indonesia Menggugat

(ket: kanan atas Sukarno 29th , Gatot Mangkoepradja 31th, Maskoen 27th, Soepradinata 24th)

Dalam pembelaan tersebut, Sukarno menggambarkan penderitaan rakyat kecil di bawah sistem kolonial yang menindas. Ia menyoroti ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan sosial yang membuat rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan. Dalam konteks inilah muncul konsep Marhaen, yakni simbol rakyat kecil yang memiliki alat produksi sendiri, namun tetap hidup miskin karena sistem kolonial membuat hasil kerjanya tidak berdaya. Ketika Sukarno menulis dan membacakan pledoi Indonesia Menggugat di pengadilan Bandung, keadaan rakyat Indonesia mayoritas kondisi hidup yang serba sulit. Masyarakat masih sangat agraris, sebagian besar rakyat adalah petani kecil dengan kepemilikan lahan yang sempit bahkan mereka hanya sebagai penggarap. Banyak dari masyarakat terjerat system tanam paksa warisan kolonial dan beban pajak yang sangat memberatkan, sehingga meskipun mereka memiliki cangkul atau sebidang tanah, mereka tetap hidup miskin. (Sartono Kartodirdjo, 1992)

Puncaknya, Pada tanggal 22 Desember 1930 dilakukan keputusan sidang. Tujuan utama persidangan selain untuk mengadili keempat terdakwa juga untuk menjadikan PNI sebagai partai yang layak untuk dibubarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Hasil sidang memutuskan Gatot Mangkoepradja dihukum 2 tahun, Maskun dihukun 1 tahun 8 bulan, Supriadinata dihukum 1 tahun 3 bulan dan Sukarno dikenai 4 tahun penjara yang semuanya dipotong masa tahanan sementara. Setelah Keputusan pengadilan, selanjutnya Sukarno dipindahkan ke Penjara Sukamiskin. Dengan jatuhnya hukuman, maka berakhirlah PNI. Walaupun PNI sempat dipimpin oleh Sartono namun

akhirnya di bubarkan. (Nanang Yudhi K, 2024) Meskipun demikian, *Indonesia Menggugat* menjadi warisan penting yang menunjukkan pandangan Sukarno tentang nasionalisme yang berpihak pada rakyat kecil, bersifat inklusif, dan berakar pada realitas sosial Indonesia.

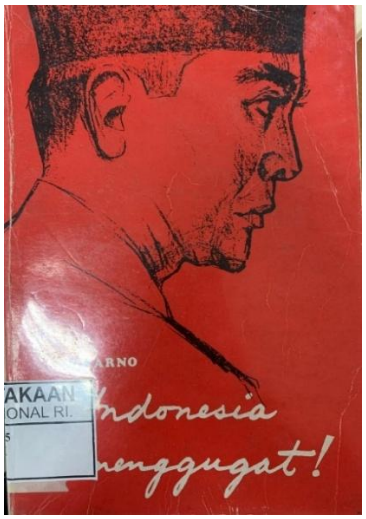
Dalam pledoi ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukanlah tindakan kriminal, melainkan perjuangan sah untuk menegakkan hak menentukan nasib sendiri. Sukarno mendasarkan kritik tajamnya pada anti-imperialisme. Bagi Sukarno kolonialisme Belanda merupakan bentuk eksploitasi struktural yang tidak hanya menghisap sumber daya alam, tetepi juga merendahkan martabat rakyat Indonesia. Ideologi anti-imperialisme yang membuat Indonesia Menggugat menjadi teks politik yang tajam karena ia mengubah posisi terdakwa menjadi penuduh: bukan rakyat yang bersalah, melainkan sistem kolonialisme itu sendiri. (Benhard Dahm, 1987)

Tinjauan Umum dan Deskripsi Buku Indonesia Menggugat

Buku "Indonesia Menggugat" telah dicetak dan diterbitkan pada banyak edisi oleh penerbit Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satunya dari Penerbit PT Inti Idayu Press, yang diterbitkan pada tahun 1983 dan bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS). Judul aslinya dalam bahasa Belanda *Indonesie Klaagt Aan* (Indonesia Menggugat). Adapun isi dari buku ini merupakan pidato pembelaan (pledoi) Sukarno saat diadili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda di Landraad (Pengadilan Negeri) Bandung pada tahun 1930. Sukarno bersama 3 rekannya yang tergabung dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) : Gatot Mangkoepradja, Maskoen dan Soepriadinata. Dengan pembelanya Mr. Sastromoeljono dan Mr. Sartono. Mereka diadili karena dianggap aktivitas politik Partai Nasional Indonesia dianggap mengancam kekuasaan kolonial dan juga mereka dituduh menyebarkan paham anti-belanda dan mengahsut rakyat untuk memberontak.

Buku ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Imperialisme dan Kapitalisme, Bab III Imperialisme di Indonesia, Bab IV Pergerakan di Indonesia, Bab V Partai Nasional Indonesia dan Bab VI Pelanggaran Pasal-Pasal 169 dan 153 bis adalah Mokal. Pada Bab I Pendahuluan, bagian ini Sukarno menyampaikan latar belakang dirinya dan rekan-rekan seperjuangannya ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial Belanda. Bab II Imperialisme dan Kapitalisme, Sukarno mengupas dengan analisis yang tajam terhadap struktur ekonomi dan politik yang digunakan kolonial menindas rakyat Indonesia. Bab III Imperialisme di Indonesia, dalam bagian ini Sukarno memfokuskan kritikannya pada bentuk dan dampak nyata dari imperialisme yang ada di Indonesia pada saat itu. Bab IV Pergerakan di Indonesia, Sukarno memuat uraian mengenai evolusi gerakan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan. Bab V Partai Nasional Indonesia, Sukarno menjelaskan bahwa PNI dibentuk sebagai wadah politik untuk mengorganisasi perlawanan rakyat terhadap penjajahan secara teratur, sah dan non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Bab VI Pelanggaran Pasal-Pasal 169 dan 153 bis adalah Mokal. Sukarno mempersoalkan keberlakuan Pasal 169 dan 153 bis yang dijadikan sebagai dasar tuntutan kepada dirinya dan rekan-rekanya.

Buku Indonesia Menggugat merupakan salah satu karya momunetal yang berisikan pledoi pembelaan Sukarno dihadapan pangedilan kolonial Belanda pada tahun 1930. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit PT. Inti Idayu Press yang bekerjasama dengan Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS), sebagai bentuk dokumentasi resmi atas perlawanan intelektual terhadap penjajahan. Buku ini memiliki judul lengkap *"Indonesia Menggugat: Pidato Pembelaan Di Depan Pengadilan Kolonial "*. Jumlah halaman dari buku ini 186 halaman, tergantung edisi dari penerbit. Untuk bahasa dalam buku ini menggunakan bahasa Indonesia.



Gambar 3. Cover Buku Indonesia Menggugat Penerbit Inti Idayu Press

Buku Indonesia Menggugat ini biasanya didominasi dengan warna gelap seperti merah marun yang mencerminkan nuansa perjuangan dan perlawanan. Pada bagian depan buku umunya terpampang foto Sukarno dari arah samping menggunakan jas formal dengan ekspresi tegas dan serius dengan gambar arsiran warna hitam yang didesain oleh Basuki Abdullah. Judul Indonesia Menggugat ditampilkan dengan huruf kapital dan tebal, menekankan nada keras dan menentang. Keseluruhan dari cover mencerminkan aura historis, ideologis dan revolusioner yang kuat. Berbeda dengan terbitan pertama dari buku Indonesia Menggugat ini. Penerbit pertama buku ini penerbitan S.K Seno pada tahun 1951. Pada bagian depan terdapat foto Sukarno bersama temannya saat di pengadilan. Buku terbitan pertama ini yang peneliti jumpai di Perpustakaan Museum Gedung Indonesia Menggugat pada saat itu berwarna hitam putih.

Pandangan Nasionalisme Sukarno dalam Buku Indonesia Menggugat

Kerangka Marhaenisme

Perkembangan ideologi Sukarno tidak dapat dilepaskan dari pencampuran dengan filsafat barat, khususnya Hegel dan Marxisme yang kemudian ia transformasikan menjadi Marhaenisme. Pada masa mudanya di Surabaya, saat Sukarno tinggal dirumah HOS. Tjokroaminoto yang merupakan tokoh Sarekat Islam, yang membuka akses baginya untuk berdiskusi dengan berbagai kalangan pergerakan. Dari sinilah ia mulai mengenal filsafat Eropa dan ide-idei sosialisme. Pemikiran Georg Wilhelm Friedrich Hegel mengenai dialektik Sejarah dan kebebasan manusia memberikan pengaruh penting, terutama gagasan bahwa perkembangan sejarah digerakkan oleh konflik yang membawa umat manusia menuju kesadaran kebebasan. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1956) Namun Sukarno menyadari bahwa filsafat Hegel bersifat idelistis. Melalui sebuah bacaan tentang Karl Marx dan Friedrich Engels, Sukarno menemukan versi materialis dari dialketika tersebut, yaitu bahwa perubahan sosial didorong oleh konflik antar kaum kelas borjuis dan proletar. (Karl Marx & Friedrich Engels, 2002)

Marhaenisme lahir sebagai hasil dari sintesis Sukarno atas Hegelianisme, Marxisme dan realitas sosial masyarakat Indonesia. dari Hegel, Sukarno mengambil metode dialektika, dari Marx ia menyerap analisis mengenai materialism historis tentang eksploitasi dan imperialisme dan dari pengalaman empiris rakyat Indonesia, ia menciptakan ideologi yang membumi. Marhaenisme menjadi ideologi khas Nusantara yang menekankan perjuangan kaum kecil, sembari menggabungkan nasionalisme, sosialisme dan demokrasi sebagai satu kesatuan perjuangan

kemerdekaan. (Anhar Gonggong, 2001) Marhaenisme lahir sebagai suatu ajaran tentang asas dan cara perjuangan rakyat Indonesia ditengah-tengah dan dari masyarakat kolonial. Imperialisme dan kolonialisme itulah penyebab dari penderitaan rakyat Indonesia. (Ali Satroamidjojo, 1961) Konsep ideologi yang diciptakan Sukarno sebgai hasil pikiran dari suasana kebatinan pada saat Indonesia digenggam oleh kekuatan imperialisme dan kolonialisme. Sukarno dengan idealis dan semangat anti penindasan merasa bahwa kolonialisme dan imperialisme merupakan hal yang harus ditentang habis-habisan karena tidak sesuai dengan prinsip berkeadilan. Pemikiran Sukarno mengenai marhaenisme sebagian besar dipengaruhi oleh tokoh sosialis barat yaitu salah satunya Karl Marx dengan Marxismenya yang mengangkat isu perjuangan kelas. Dari konsep marhaenisme lebih menekankan pada perjuangan secara *holistic* yakni perjuangan anatara yang terjajah dengan yang menjajah. (F. Pratama, A.Asyiah, D. Chandra, 2022) Dan juga Sukarno memperkenalkan istilah "Marhaen" berdasarkan pengelamannya bertemu dengan seorang petani miskin di Bandung yang tetap memiliki alat produksi sendiri, namun tetap hidup dalam kemiskinan. (Cindy Adams, 2015) Marhaenisme pun menjadi representasi bagi kaum tertindas, bukan hanya petani tetapi juga buruh dan rakyat kecil lainnya. Sukarno menyatakan bahwa Marhaen bukan proletar, ia memiliki alat produksi tapi mereka tetap terjajah. Karena itu perjuangan rakyat Indonesia bukan hanya semata-mata perjuangan kelas buruh tetapi perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang tertindas. Sukarno juga menggunakan konsep sosialisme dalam ideologi marhaenisme yaitu sosialisme Indonesia. Ia mengartikan sebagai kehendak untuk memperoleh keadilan secara sama rasa dan sama rata. Sosialisme itu usaha memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan untuk semua manusia tanpa ada eksploitasi. (F. Pratama, A.Asyiah, D. Chandra, 2022)

Dalam ideologi marhaenisme, Sukarno memposisikan Nasionalisme sebagai kekuatan pembebasan rakyat dari penindasan struktural yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Marhaenisme lahir dari hasil observasi Sukarno terhadap rakyat kecil seperti petani dan buruh yang secara ekonomi tertindas, namun mereka masih memiliki alat produksi sendiri. Pemikiran Sukarno tentang marhaenisme ditegakkan diatas sila 4 sila yaitu inernasionalisme atau peri kemanusiaan, nasionalisme atau peri kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan sosial. (William Ebenstein & Edwin Fogelman, 1990) Terdapat lima landasan pokok paham marhaenisme menurut pemikiran Sukarno meliputi: radikal-revolusioner, *nonkooperatif*, massa-aksi, *machtvorming*, dan *self-help & reliance.* Radikal-revolusioner (perubahan berdasarkan kehendak zaman yang cepat) merupakan perubahan cepat yang menginginkan berakhirnya masa imperialism dan hal-hal yang terakit dengan penindasan serta perampasan hal secara paksa. Sukarno selalu menegaskan tentang pentingnya rakyat yang radikal revolusioner, karena tidak ada perjuangan yang bisa mendobrak penjajahan di atas tanah Indonesia tanpa mereka yang benar-benar memiliki pemikiran dan sikap yang radikal revolusioner. Kemudian *machtsvorming* (penyususnan kekuatan atau penyusunan tenaga), merupakan sebuah perubahan besar yang dilakukan oleh mereka yang menang, tidak boleh ada keraguan dan pertimbangan untung maupun rugi untuk menghimpun macht tersebut. Jadi kekuatan atau kekuasaan menjadi modal politik yang mau tidak mau harus dijalankan untuk melawan segala hal yang menjadi musuh marhaen, yaitu penindasan dan ketidakadilan. Massa-Aksi yaitu segenap kekuatan yang mendukung gerakan perjuangan yang berasal dari seluruh komponen masyarakat Indonesia. Sukarno menekankan bahwa massa-asksi bukan hal yang dilakukan dikemudian hari, tetapi massa-aksi seusatu yang terjadi saat ini, kekuatan massa itu ada dalam keseharian kita, mereka yang bergerak dalam organisasi, meteka yang menulis artikel-artikel di sura kabar, mereka yang membentuk perhimpunan, mereka yang menyelenggarakan rapat khusus, mereka yang melakukan demonstrasi, semua itu adalah bagian dari perjuangan

massa-aksinya kaum marhaen. Non-kooperasi artinya tidak bekerja sama dengan pihak penjajah. Jika rakyat atau massa bekerja dengan penjajah, maka sulit untuk meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya *Self-help & Self-reliance*, self-help artinya yaitu kemandirian dan tidak bergantung kepada orang lain. Menurut Sukarno *self-help* dimaknai dengan apa yang disebut dengan berdikari 'berdiri diatas kaki sendiri'. Sedangkan *self-reliance* masih berkaitan dengan konsep berdikari Sukarno, tetapi *self-reliance* lebih menekankan kepada kepercayaan diri. Dengan kata lain *self-reliance* adalah cara bangsa Indonesia untuk mendiri dan percaya pada kekuatan diri sendiri tanpa mengandalkan orang lain untuk memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar sendiri yang mengacu nilai-nilai perjuangan yang dianut. (Ali Sastroamidjojo, 1961)

Dalam kelima asas Marhaenisme yang dijelaskan kemudian diramu oleh Sukarno ke dalam istilah sosio-demokrasi dan sosio-nasionalisme. Sosio-demokrasi yaitu suatu sistem yang tidak hanya mengakomodasi kepentingan elit politik saja, tetapi juga bertujuan untuk mengubah nasib rakyat dan menghilangkan kemiskinan. Sedangkan sosio-nasionalisme yaitu nasionalisme yang tidak hanya mengacu pada aspek politik saja, tetapi juga ekonomi. Sosio-nasionalisme bermaksud untuk memperbaiki keadaan masyarakat luas agar tidak lagi tertindas, tidak ada lagi kaum yang celaka, dan tidak ada lagi kaum yang sengsara. (F. Pratama., A. Asyiah., D. Chandra, 2022)

Sukarno menegaskan bahwa perjuangan nasional tidak akan bermakna tanpa perubahan struktur ekonomi dan sosial yang menindas. Dalam pledoinya ia mengatakan bahwa sistem kolonial Belanda telah menciptakan suatu pergaulan hidup merk-kromo, yaitu system yang memaksa rakyat Indonesia menjadi kaum buruh dan tani miskin yang tidak memiliki daya tawar dalam kehidupan sosial ekonomi. Pergaulan hidup merk-kromo dan merk-marhaen merupakan pergaulan hidup yang sebagian besar sekali adalah terdiri dari kaum tani kecil, kaum buruh kecil, kaum pedagang kecil, kaum pelayar kecil. (Sukarno, 1982) Dalam konteks ini, Nasionalisme marhaen bersifat revolusioner sesuai dengan asas marhaenisme, karena bertujuan menghancurkan dominasi kapitalisme kolonial dan membangun strukur ekonomi yang berpihak kepada rakyat.

Konsep Marhaenisme lahir dari realitas pahit yang dialami oleh rakyat kecil akibat dominasi kolonialisme dan imperialisme. Ungkapan "kekromoan dan kemarhaenan" menegaskan bahwa posisi rakyat sebagai mayoritas yang selalu ditekan oleh system ekonomi kapitalis-imperialis sejak masa *VOC*, *cultuurstelsel* hingga kolonialisme modern. Sukarno juga melihat bahwa tidak hanya menguasai tanah dan hasil bumi tetapi juga menghancurkan sektor lain seperti perdagangan, pertukangan dan industri kecil lainnya. Pandangan Nasionalisme Sukarno bukan hanya bersifat politik tetapi juga bersifat ekonomi-sosial, membangun kedaulatan bangsa dengan cara memberdayakan rakyat kecil agar terbebas dari sistem monopoli kolonial. Nasionalisme marhaenisme berorientasi kepada kemandirian ekonomi nasional, pembebasan dari belenggu kolonialisme, serta penegasan identitas bangsa Indonesia. (Sukarno, 1982)

Dalam kerangka Nasionalisme marhaenisme, Sukarno juga menegaskan bahwa massa adalah sumber kekuatan politik bangsa. Oleh karena itu kaum intelektual tidak boleh hanya berpolitik etis atau terbatas dalam "politik salon", melainkan mereka harus turun ke tengah rakyat untuk membangkitkan kesadaran nasional dan menyusun energi kolektif dalam perjuangan. Sukarno memberikan semboyan "di dalam massa, dengan massa dan untuk massa", dalam semboyan tersebut memperlihatkan pandangan Nasionalisme Sukarno yang bersifat kerakyatan dan revolusioner, karena ia berpihak pada kekuatan rakyat sebagai subjek utama dalam perjuangan melawan imperialisme. (Sukarno, 1982) Marhaenisme bukan hanya gerakan ekonomi, melainkan juga ideologi politik dan sosial yang bertujuan membebaskan rakyat Indonesia dari penindasan. Dalam buku ini Sukarno menyatukan Nasionalisme, sosialisme dan demokrasi sebagai satu

kesatuan perjuangan. Marhaenisme mengusung prinsip kesetaraan dan keadilan sosial bagi landasan membangun bangsa merdeka yang berdaulat atas dirinya sendiri.

Pemikiran Marhaenisme tetap relevan dalam membangun Indonesia modern. Prinsip kedaulatan rakyat, pemerataan ekonomi dan keadilan sosial yang di usung oleh Sukarno menjadi dasar dalam pembentukan system politik dan ekonomi nasional pasca-kemerdekaan. Marhaenisme menjadi inspirasi penting dalam perumusan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan pentingnya "perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan", dengan menekankan prinsip ekonomi kerakyatan. Marhaenisme dapat dijadikan sebagai alat pemecah arus gelombang ideologi asing seperti demokrasi liberal, neo-kolonialisme dan neo-kapitalisme yang sedang mencengkram Indonesia di awal abad ke-21 saat ini. Marhaenisme bisa dipahami sebagai cara untuk memahami Pancasila secara "kaffah" agar rakyat Indonesia benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan sungguh-sungguh. (F. Pratama., A. Asyiah., D. Chandra. 2022)

Kritik Terhadap Kolonialisme dan Penindasan

Dalam pledoinya Sukarno mengupas dengan tajam berbagai bentuk ketidakadilan, eksploitasi serta strategi dehumanisasi (kondisi manusia tidak lagi memanusiakan manusia, tetapi menilainya sebagai objek) yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kritik ini tidak hanya ditujukan kepada institusi kolonial, tetapi juga terhadap sistem kapitalisme global yang menjadi akar dari penindasan kolonial. Dalam buku Indonesia menggugat ini tidak hanya menggambarkan semangat Nasionalisme yang membara, tetapi juga merupakan manifestasi dari kritik ideologis Sukarno terhadap sistem kolonialisme yang menindas rakyat Indonesia. Dalam buku Indonesia Menggugat, Sukarno menjelaskan bahwa kolonialisme Belanda tidak sekedar menaklukkan wilayah, tetapi juga secara sistematis merampas sumber daya alam dan tenaga rakyat Indonesia demi kepentingan ekonomi kapitalis asing. Sukarno menggambarkan bahwa ekonomi kolonial hanya menguntungkan bagi kaum modal di negeri jajahan dan memperah penderitaan rakyat pribumi. (Sukarno, 1982)

Sukarno menegaskan bahwa kolonialisme Belanda yang berakar sejak masa VOC dan sistem tanam paksa merupakan praktik penindasan lama yang meninggalkan luka mendalam dalam kesadaran bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat akibat eksploitasi kolonial bagi Sukarno bukan sekadar catatan sejarah, tetapi bagian dari kesadaran kolektif bangsa yang harus terus diingat sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Ia juga mengaitkan *cultuurstelsel* dengan kapitalisme modern yang berkembang di Belanda pada abad ke-19, di mana sistem tanam paksa tersebut menjerumuskan rakyat Indonesia dalam penderitaan demi memenuhi kebutuhan kaum borjuis Belanda dalam menyiapkan kapitalisme di negeri mereka sendiri. (Sukarno, 1982) Sukarno menegaskan bahwa kapitalisme bukanlah entitas perorang, bukan pula bangsa tertentu, melainkan sebuah sistem produksi yang menimbulkan kesenjangan dan eksploitasi. Ia menolak untuk menjelaskan lebih panjang mengenai hakikat kapitalisme, karena menurutnya kaum intelektual sudah memahami bahwa system ini sudah menghasilkan ribuan studi dan literatur yang membahas tentang watak eksploitatif Belanda.

Dari pandangan Nasionalisme, Sukarno melihat bahwa imperialisme sebagai anak kandung kapitalisme tidak semata-mata hadir dalam bentuk kekuatan militer yang dapat menaklukkan negeri lain, tetapi melalui cara halus berupa penerobosan ekonomi, politik, dan budaya. Kritik Sukarno terhadap sistem ini menegaskan bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya melawan fisik kolonial Belanda, tetapi melawan struktur ekonomi-politik global. Nasionalisme Sukarno bukanlah sebuah chauvanisme sempit, melainkan sebuah gagasan yang menolak segala

bentuk imperialism dalam wujud apapun, bauk secara kasar maupun halus. Oleh karena itu, kritik terhadap kolonialisme dan kapitalisme tidak dapat dilepaskan dari ideologi Nasionalisme yang ia rintis , sebuah Nasionalisme yang mengakar pada penderitaan rakyat kecil (marhaen), berpijak pada keadilan sosial, dan mengarah pada pembebasan bangsa dari belenggu penindasan. Bagi Sukarno pembangunan tanpa kedaulatan hanyalah bentuk lain dari penindasan. Nasionalisme yang ia usung bertujuan membongkar ilusi tersebut agar rakyat tidak terpedaya oleh bayangan modernisasi kolonial. Kritik Sukarno terhadap imperialisme modern menjadi bagian dari upaya membangkitkan kesadaran nasional bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat dicapai apabila bangsa Indonesia terbebas dari segala bentuk imperialisme.

Sukarno memperlihatkan kritik tajam nya terhadap imperialisme modern yang tidak pernah memberikan hak-hak yang sepadan dengan penderitaan bangsa Indonesia. segala bentuk pembangunan dan kemajuan yang ditawarkan oleh Belanda tidak mampu menjadi pengimbang bagi kerusakan sosial, ekonomi, dan kehidupan rakyat akibat imperialisme. Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia tidak pernah ditebus oleh hak-hak dasar atau kebijakam yang berpihak kepada rakyat. Tidak ada hak yang diberikan penjajah yang dapat dijadikan penguat oleh bangsa Indonesia untuk menghentikan laju eksploitasi yang dilakukan kolonialisme modern. Kritik tersebut mencerminkan Nasionalisme Sukarno yang menolak bahwa ide kolonialisme membawa manfaat bagi rakyat jajahan. Pembangunan yang disediakan kolonialisme hanya alat untuk memperlancar eksploitasi, bukan sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sukarno menggarisbawahi perjuangan bangsa Indonesia harus diarahkan pada kemerdekaan sejati, yaitu kemerdekaan yang menjamin hak-hak politik, sosial, dan ekonomi rakyat tanpa adanya imperialisme. Pandangan Nasionalisme ini menempatkan kedaulatan penuh bangsa sebagai sesuatu yang mutlak, karena kedaulatan penuh bangsa Indonesia dapat membangun kehidupan yang adil, sejahtera, dan terlepas dari penindasan. Kritik Sukarno terhadap imperialisme modern tidak hanya bernuansa historis, tetapi juga merupakan landasan ideologis bagi lahirnya Nasionalisme Indonesia yang anti-kolonial dan anti-penindasan. (Sukarno, 1982)

Kritik Sukarno terhadap kolonialisme menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya melawan kekuasaan politik Belanda, tetapi juga sistem kapitalisme yang menopang imperialisme. Nasionalisme yang ia usung menolak segala bentuk eksploitasi manusia dan bangsa. Sukarno meyakini bahwa hanya melalui kesadaran kolektif dan persatuan nasional, bangsa Indonesia dapat melepaskan diri dari sistem penindasan tersebut. Dengan menyingkap penderitaan akibat VOC dan sistem tanam paksa, Sukarno berupaya membangkitkan semangat nasionalisme yang berpijak pada pengalaman rakyat sendiri, sebagai dasar perjuangan menuju kemerdekaan dan kedaulatan bangsa.

Relevansi Pemikiran Sukarno Terhadap Perkembangan Nasionalisme Indonesia

Pemikiran Sukarno dalam buku Indonesia menggugat memiliki signifikasi yang mendalam dalam proses pembentukan dan perkembangan Nasionalisme Indonesia. Buku Indonesia menggugat merupakan pidato pembelaan Sukarno di pengadilan Belanda atas tuduhan. Indonesia menggugat menjadi dokumen penting dan ideologis yang memuat fondasi pemikiran Sukarno mengenai bangsa, kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pledoi ini mempresentasikan awal dari Nasionalisme modern Indonesia yang tidak hanya berbasis pada semangat kemerdekaan, tetapi juga pada analisis terhadap ketertindasan rakyat Indonesia pada masa itu. Meskipun sebagai terdakwa, Sukarno memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan kritik tajam terhadap kolonialisme dan menyampaikan gagasan Nasionalisme Indonesia secara sistematis dan terstruktur.

Sukarno menolak Nasionalisme borjuis yang berkembang di barat, yang sering berwujud imperalisme dan dominasi terhadap bangsa lain. Sukarno menawarkan Nasionalisme Indonesia sebagai Nasionalisme yang membebaskan rakyat dari penjajahan dan penderitaan. Sukarno menyerukan persatuan nasional untuk melepaskan diri dari belenggu feodalisme dan politik pecah belah yang diwariskan oleh kolonialisme. Sukarno berhasil memadukan ide-ide modern dengan realitas sosial masyarakat Indonesia, khususnya dalam menempatkan rakyat kecil (marhaen) sebagai pusat perjuangan. (Arifin, Zainal & Sarwono Agus, 2019) Konsep marhaenisme diperkenalkan Sukarno merupakan bentuk Nasionalisme yang tidak hanya bersifat politis, tetapi juga sosial dan ekonomi. Nasionalisme yang diperjuangkan bukan hanya sekedar kemerdekaan formal, tetapi juga kemerdekaan sejati yang mewujud dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat. (Yudi Latif, 2015)

Dalam buku Indonesia Menggugat, Sukarno menggabungkan kritik moral, ilmiah dan historis terhadap kolonialisme. Pledoi Indonesia Menggugat menggugat bukan sekedar dokumen perlawanan, tetapi juga sebagai karya pemikiran politik yang menginspirasi generasi berikutnya. (Rosidi Ajip, 2021) relevansi pemikiran Sukarno juga tercermin dalam kebijakan politiknya di masa kemerdekaan. Konsep "Nasakom" (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang digagas oleh Sukarno merupakan kelanjutan dari semangat inklusivitas yang diusung sejak masa pledoi. Meskipun mendapat kritik, nasakom merupakan cerminan dari uapaya menyatukan kekuatan-kekuatan sosial besar yang ada di Indonesia untuk membangun bangsa yang merdeka, bersatu dan berdaulat. (Anshor Muhammad, 2020)

Dalam konteks kekinian, relevansi pemikiran Sukarno semakin nyata ketika Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi, radikalisme dan ketimpangan sosial. Semangat persatuan dalam keragaman, perjuangan membela kaum tertindas dan kritik terhadap hegemoni asing menjadi landasan ideologis yang tetap actual. Nasionalisme kerakyatan yang dikembangkan Sukarno melalui Indonesia menggugat menjadi acuan penting dalam memperkuat identitas kebangsaan yang tidak eksklusif tetapi terbuka. (Hasyim Syafiq, 2018) Saat ini tantangan terhadap Nasionalisme tidak lagi berupa kolonialisme dalam bentuk klasik, melainkan penetrasi budaya global, neoliberalisme, dan krisis identitas digital. Maka Nasionalisme ala Sukarno tetap relevan, terutama untuk mengkritik dan melawan ketimpangan global yang membuat bangsa-bangsa dunia ketiga tetap bergantung secara struktural. Nasionalisme harus menjadi landasan emansipasi baru dalam membangun kedaulatan teknologi, kemandirian ekonomi, dan revitalisasi budaya lokal di tengah serbuan globalisasi saat ini. Hal ini bisa dicapai apabila nilai-nilai Nasionalisme diajarkan kembali dengan menggunakan pendekatan yang relektif, bukan sekedar formalitas upacara. (I. Kamajaya. 2025)

Salah satu relevansi pemikiran Sukarno terhadap perkembangan Nasionalisme Indonesia akhir-akhir ini yaitu pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 23 September 2025 di New York menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai anti-penindasan, perdamaian, dan kemanusiaan universal. Dari pidato tersebut terdapat 2 aspek utama relevansi dengan perkembangan Nasionalisme Indonesia. Pertama, Nasionalisme sebagai anti-penindasan dan kemanusiaan secara universal. Sukarno memandang nasionalisme Indonesia bukan sebagai bentuk chauvinisme yang menonjolkan bangsa sendiri, melainkan sebagai semangat pembebasan yang berpihak pada bangsa-bangsa tertindas di seluruh dunia. Kedua, Solidaritas Internasional. Sukarno menegaskan bahwa Indonesia harus menjadi bagian dari kekuatan dunia yang berjuang bagi perdamaian, tanpa terjebak dalam blok politik manapun. Dengan demikian, pidato Presiden

Prabowo di PBB mencerminkan kesinambungan ideologis dari pemikiran Sukarno tentang nasionalisme. Nasionalisme Indonesia tidak berhenti pada cinta tanah air saja, tetapi berkembang menjadi kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa lain. (Kompas.com, 2025)

KESIMPULAN

Pandangan Nasionalisme Sukarno merupakan hasil dari perpaduan kuat antara latar belakang budaya, lingkungan sosial, dan pengalaman politiknya. Konsep *kultuurgebundenhet* sangat berpengaruh dalam membentuk kesadaran sosial dan politik Sukarno. Latar belakang keluarganya yang berasal dari perpaduan budaya Jawa dan Bali menumbuhkan pandangan hidup yang menekankan gotong royong, spiritualitas, dan keseimbangan antara kemajuan material serta nilai kemanusiaan. Nilai-nilai inilah yang menjadi salah satu fondasi ideologi Marhaenisme, yang berpihak pada rakyat kecil dan menolak ketimpangan sosial.Selain itu, pergaulan Sukarno dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti H.O.S. Tjokroaminoto, Ki Hajar Dewantara, dan Dr. Cipto Mangunkusumo memperkuat pemikirannya tentang Nasionalisme yang inklusif dan berbasis pada perjuangan bersama seluruh rakyat tanpa memandang kelas sosial maupun agama. Pengalamannya dalam berbagai organisasi seperti Sarekat Islam, Indische Partij, dan Partai Nasional Indonesia memperluas pandangannya tentang perjuangan kolektif dan kemandirian bangsa.

Dalam konteks sejarah kebangkitan nasional awal abad ke-20, gagasan Sukarno menjadi simbol perlawanan terhadap imperialisme dan ketidakadilan kolonial. Melalui karya monumentalnya *Indonesia Menggugat*, Sukarno menegaskan bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan atas dasar persatuan, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Dengan demikian, nasionalisme Sukarno bukan sekadar hasil pengaruh ideologi luar, melainkan lahir dari akar budaya Indonesia yang memadukan nilai tradisi, spiritualitas, dan kesadaran sosial untuk membangun bangsa yang merdeka, adil, dan berdaulat.

Pandangan Nasionalisme Sukarno dalam Indonesia Menggugat merupakan campuran antara pengaruh filsafat Barat (Hegel dan Marx) dengan realitas sosial rakyat Indonesia yang tertindas oleh kolonialisme. Dari dialektika Hegel, Sukarno mengambil semangat perubahan dan kebebasan, sedangkan dari Marxisme, Sukarno menyerap kritik terhadap kapitalisme, dan dari pengalaman rakyat kecil, ia melahirkan ideologi Marhaenisme yang merupakan suatu bentuk Nasionalisme kerakyatan yang menekankan perjuangan seluruh rakyat tertindas untuk mencapai keadilan sosial, kemandirian, dan kemerdekaan sejati. Marhaenisme menjadi dasar nasionalisme revolusioner yang berpijak pada prinsip sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, menolak imperialisme serta mengedepankan semangat gotong royong, kemandirian (*self-help*), dan kekuatan massa. Bagi Sukarno, Nasionalisme tidak hanya perjuangan politik, tetapi juga ekonomi dan sosial untuk membebaskan rakyat dari penindasan struktural. Melalui Indonesia Menggugat, Sukarno menegaskan kritik tajam terhadap kolonialisme dan kapitalisme global yang menindas bangsa Indonesia. Ia menolak pandangan bahwa kolonialisme membawa kemajuan, dan menegaskan bahwa kemerdekaan sejati hanya dapat diraih melalui kedaulatan penuh atas politik, ekonomi, dan kebudayaan bangsa.

Relevansi pandangan Sukarno tetap kuat hingga kini. Prinsip Nasionalisme kerakyatan, anti-penindasan, dan solidaritas internasional menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan modern seperti neoliberalisme, ketimpangan sosial, dan krisis identitas global. Pandangan Sukarno membentuk fondasi ideologis bangsa yang menekankan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial,

menjadikan Nasionalisme Indonesia bukan hanya cinta tanah air, tetapi juga perjuangan universal untuk kemanusiaan dan kebebasan.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, Cindy. 2015. *Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Bung Karno.

Ajip, Rosidi. 2021. *Sukarno: Biografi Politik dan Budaya*. Bandung: Mizan.

Ali Sastroamidjojo. 1961. *Dasar – Dasar Pokok Marhaenisme*. Jakarta: Partai Nasional Indonesia.

Anwar, Rosihan. 1986. *Sukarno: Biografi Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dahm, Benhard. 1987. *Soekarno dan Perjalanan Kemerdekaan*. Jakarta: LP3ES.

Dewantara, Ki Hajar. 1977. *Karya Ki Hajar Dewantara Bagian Pertama: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

Dimyati, Mohammd. 1951. *Sejarah Perjuangan Indonesia*. Jakarta: Widjaya.

Ebenstein, William & Edwin Fogelman., 1990. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Jakarta: Erlangga.

Engels, Friedrich & Karl Marx. 2002. *The Communist Manifesto*. London: Penguin Publishing Group.

Gonggong, Anhar. 2001. *Soekarno: Pemikiran, Tindakan dan Jejak Sejarahnya*. Jakarta: Grasindo.

Gonggong, Anhar. 2011. *Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Gonggong, Anhar. 2016. *Sukarno: Pemikiran, Perjuangan dan Kepemimpinan*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

Hegel, Geory Wilhelm Friedrich. 1956. *The Philosophy of History*. New York: Doker Publications.

John, D. Legge. 1972. *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Harapan.

Kahin, George Mc Turnan. 1952. *Nasionalism and Revolution In Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.

Kahin, George Mc. Tuman. 1995. *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. terjemahan Nin Bakdi Soemanto. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kamajaya, I. 2025. Pemikiran Soekarno tentang Nasionalisme dan Multikulturarisme di Era Revolusi Industri 4.0: Membangun Identitas Nasional Dalam Arus Globalisasi. *Jurnal Sangkala*. Vol.4. No.1.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pengantar Sejarah Baru: Sejarah Pergerakan Nasional* Jilid II. Jakarta: Gramedia.

Kusmawardani, Anggraeni & Fathurocman. 2004. "Nasionalisme". Buletin Psikologi. No. 2. https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/viewFile/7469/5808

Muhammad, Anshor. 2020. *Sukarno dan Akar Nasionalism*e. Bandung.: Mizan.

Mulder, Hiels. 1978. *Mysticim and Everyday Life In Contemporary Java*. Singapore: Singapore University Press.

Nagazumi, Akira. 1989. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918.* Terjemahan Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Nanang, Yudhi K. 2024. *Komparasi Pledoi Bung Karno Indonesie Klagaat dan Pledoi Bung Hatta Indonesie Vrij*. Blitar: UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno.

Peter, Kasenda. 2010. *Sukarno Muda: Biografi Pemikiran 1926-1933*. Jakarta: Komunitas Bambu.

Pitana, I Gede. 1993. Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali dalam *Bali dan Islam.* Denpasar: Bali Post.

Pratama, F. A. Asyiah., D. Chandra., 2022. Studi Analisis Konsep Ideologi Marhaenisme Sukarno Sebagai Asas Perjuangan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 19. No.1.

Ratnaningtias, Hita Vivi. 2019. "Kupas Tuntas Nasionalisme Dan Kepeloporan Bung Karno Dalam Buku 'Indonesia Menggugat'". *Jurnal Pedagogi*. Vol. 1. No. 4. https://eprints.upjb.ac.id/id/eprint/855/

Ricklefs, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.

Sartono, Kartodirdjo, dkk. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia V : Pergerakan Nasional.* Jakarta: Balai Pustaka.

Scheret, Savitri. 1999. "Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran Nasionalisme Awal Di Jawa" dalam *Pemikiran Politik Indonesia*. ed. Soedjarmoko. Jakarta: LP3ES.

Sukarno. 1965. *Dibawah Bendera Revolusi* Jilid I. Jakarta: Panitia Penerbitan Dibawah Bendera Revolusi.

Sukarno. 1983. *Indonesia Menggugat*. Jakarta: Inti Idayu Press.

Suseno, Hendri., 2015. *Bung Karno: The Founding Father*. Yogyakarta: Notebook.

Susilo, Nina. "Pidato Presiden Prabowo di Sidang Umum PBB Serukan Kemerdekaan Palestina." *Kompas.com*, 23 September 2025. https://www.kompas.com

Syafiq, Hasyim. 2018. *Islam Nusantara dan Nasionalisme Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Syahrir, Sutan. 1948. *Perjuangan Kita*. Jakarta: Pustaka Antara.

Takashi, Shiraishi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. Jakarta: Grafiti.

Tappil Rambe, PS Lukitoyo dkk. 2019. *Sejarah Politik dan Kekuasaan: Islam Nasionalisme dan Komunisme dalam Pusaran Kekuasaan Di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Vickers, Adrian. 1989. *Bali: A Paradise Created*. Ringwood: Penguin Books

Yudi, Latif. 2015. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainal, Arifin & Sarwono Agus. 2019. *Pemikiran Politik Sukarno dan Revolusinya dalam Konteks Keindonesiaan Kontemporer*. Yogyakarta: Deepublish.

Zeid. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.